

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik simpulan bahwa hasil pengujian hipotesis menemukan bahwa PBB-P2 Kota Gorontalo sebelum desentralisasi tidak memiliki perbedaan signifikan dibandingkan dengan PBB-P2 Kota Gorontalo setelah desentralisasi, dikarenakan nilai thitung lebih kecil dibandingkan nilai ttabel artinya Pemerintah Daerah sudah mampu mencapai hasil-hasil pengelolaan seperti yang dicapai oleh Pemerintah Pusat.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan yang telah diuraikan di atas, maka saran penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebaiknya pihak Pemerintah Kota Gorontalo melakukan tindakan-tindakan dan langkah konkrit berupa intensifikasi dan ekstensifikasi pajak terkait penerimaan PBB-P2. Serta perlunya sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya penerimaan pajak ini bagi daerah tingkat dua (Kabupaten/Kota) agar lebih bisa meningkatkan pendapatan daerah khususnya dari hasil PBB-P2.
2. Perlunya koordinasi antara Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Kota terkait penerimaan PBB-P2 dan efektivitasnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditama, dkk. 2013. Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Wilayah Singosari. *Skripsi*. Universitas Brawijaya
- Anggraeni, Dian. 2011. Analisis Strategi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Surabaya Terhadap Peningkatan Realisasi Target Penerimaannya dari Tahun 2006-2011. Surabaya: *Jurnal Akunesa* Vol.1/ No.1/2012.
- Arikunto, Suharsimi. 2007. *Manajemen penelitian* , Jakarta: Rineka cipta.
- Devas, Binder, Booth, Davey, Kelly, 1989, *keuangan pemerintah daerah di Indonesia*, Universitas Indonesia: (UI-Press).
- Direktorat Jenderal Pajak, 2012. Pengalihan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Pbb-P2) Sebagai Pajak Daerah. <http://www.pajak.go.id/content/pengalihan-pbb-perdesaan-dan-perkotaan>.
- Harinaldi, 2005. *Prinsip-Prinsip Statistik Untuk Teknik Dan Sains*. Jakarta: Erlangga.
- Labantu, Haris. 2013. Analisis Prosedur Pemungutan PBB Sektor Perdesaan Dan Perkotaan Kabupaten Minahasa Di KPP Pratama Bitung. *Jurnal EMBA*, Vol.1 No.3 Juni
- Latan, Hengky dan Selva temalagi. 2013. *Analisis Multivariate dan Aplikasi Menggunakan Program IBM SPSS 20,0*. Bandung: Alfabeta
- Malik, Jamaludin. 2010. Analisis Perbandingan Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan PAD Sebelum Dan Sesudah Otonomi Periode Tahun 2006-2010 Pada Kota Tangerang Selatan. *Skripsi*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif.
- Mardiasmo, 2011. *Perpajakan* Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi.
- Megawati, Retno. 2015. Implementasi Atas Desentralisasi Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan (PBB-P2). *Jurnal (JAB)*, Vol. 4 No. 2 Maret.
- Radjak, Nurhayati (2014). Analisis Efektivitas Pemungutan BPHTB dan Pengaruhnya Terhadap Pajak Daerah Kota Gorontalo. *Skripsi*. Gorontalo. Universitas Negeri Gorontalo.

- Rahman, Abdul (2011). *Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Soreang Kota Pare – Pare, Makassar*. Tesis S1 ini Tidak Dipublikasikan, Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Ramadhan, Fahrival. 2014. Pengaruh Pelimpahan Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Pedesaan Dan Perkotaan Menjadi Pajak Daerah Terhadap Realisasi Penerimaannya Di Kota Surabaya. Skripsi. Surabaya: Universitas Negeri Surabaya.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Sari, Yulia Anggara. 2011. Analisis Efektivitas dan Kontribusi Proses Pelayanan Pengalihan Pengelolaan Serta Pemasukan Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Daerah. *Jurnal Ilmiah*. Universitas Brawijaya. Malang.
- Sekaran, Uma. 2006. *Metodologi Penelitian Bisnis Edisi 4*, Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono, 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiono, Ikhwan. 2013. Analisis Perbandingan Penerimaan Pajak Reklame Dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Sebelum Dan Sesudah Pemekaran Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Tangerang. *Skripsi*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Soemitro, Rochmat, 1989. Pajak Bumi dan Bangunan, Bandung, PT. Eresco.
- Suandy, Early. 2002, *Perpajakan*. Jakarta: PT Salemba Empat.
- Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 9 Tahun 2011. Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan.
- Yani, Ahmad. 2002. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.